Bobby Nonaktifkan 4 Pejabat Eselon .....

Dari Halaman 1

bahwa ia menerima surat pembebasan tugas pada 11 April 2025. Ia menyebutkan status mereka masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat, apakah akan dinonjobkan sementara atau didemosi.

Inspektur Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, memastikan bahwa penonaktifan ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal yang masih berlangsung.

"Jika mengacu pada PP 94 Tahun 2021, ada indikasi pelanggaran disiplin berat," tegasnya.

Langkah ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai akar persoalan yang menjerat keempat pejabat tersebut.**(A-05/KSC)**

Jokowi Timbang Langkah Hukum .....

Dari Halaman 1

harus membuktikan.

"Ya dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara (kuasa hukum) karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM (Prof Ova Emilia), terakhir juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan (Ir Sigit Sunarta), kan sudah jelas semuanya," ujar Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo, Jumat (11/4) pekan lalu.

Jokowi mengungkapkan alasan mengambil langkah hukum tersebut karena ingin menunjukkan kebenarannya. Terlebih, karena meskipun sudah ada pihak berkompeten menyampaikan keabsahan ijazah miliknya, yakni Rektor UGM, masih ada saja pihak yang terus mempersoalkannya.

"Ya kami kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor. Oleh dekan juga sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf-lah, urusan angka, wah kalau itu ya udah. Dan yang paling penting siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh,

dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu," kata Jokowi.

Terkait langkah hukum yang akan diambil, Jokowi mengatakan, saat ini masih dalam kajian para pengacara.

"Ini masih dalam kajian para pengacara. Jadi tanyakan nanti ke pengacara," ucap dia.

MAJU JIKA...

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Jokowi memastikan bakal maju mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi yang konteksnya lebih mengarah pada fitnah atau penyebaran informasi bohong atau hoax.

Pernyataan itu disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Jokowi seusai bertemu dengan Jokowi di kediaman Sumber, Rabu (9/49.

Mereka yang hadir Rabu siang lalu, yakni Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara.

Kedatangan tim ini sekaligus untuk bersilaturahmi dengan Jokowi.

Yakup --putra Otto Hasibuan, Wamenko Kumham Impas-- mengungkapkan, pertemuan mereka dengan Jokowi di antaranya membahas berbagai isu yang ramai di masyarakat.

Salah satunya mengenai mencuatnya kembali isu ijazah palsu Jokowi dari kampus UGM Yogyakarta.

"Meski hal ini kan sebenarnya sudah lama ya, sejak 2023 perkaranya. Dan kami sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi sejak itu," ujarnya kepada wartawan usai bertemu Jokowi.

Ia mengatakan, sejak 2023 lalu pihaknya sudah menangani dua gugatan hukum mengenai ijazah Jokowi dan memenangkan semua perkaranya.

"Perkara inkracht dimenangkan Jokowi itu kini dimunculkan lagi saat pensiun. Kami pun merasa bingung. Lantaran semua bukti sudah menunjukkan keaslian ijazah Jokowi," katanya.

RISMON

Polemik seputar ijazah Jokowi kembali mencuat setelah mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

Rismon --alumni Fakultas Teknik UGM-- menilai penggunaan font Times New Roman dalam dokumen tersebut belum ada di era 1980-an hingga 1990-an. **(tem/cp/js).**

Negara Dibohongi, Pagar Laut PIK-2 Masih .....

Dari Halaman 1

Meski Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (62) mengklaim pagar laut tersebut telah dicabut dan kemudian hanya menyebut seorang level kepala desa, Arsin, sebagai pihak bertanggung jawab. Tetapi fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR) menyebut pernyataan Menteri Trenggono tersebut sebagai kebohongan publik.

"Kami tidak percaya kepala desa Arsin bisa membangun pagar laut sepanjang 30,16 km, apalagi siap membayar denda Rp48 miliar. Ini tidak masuk akal (waras)," kata Ahmad Khozinudin SH, advokat sekaligus koordinator tim TA-MOR-PTR, Jumat (11/4)--dikutip dari laporan jakartasatu.com, Senin 14/4 kemarin.

INSPEKSI KEJUT

Pada Kamis (10/4), dua tim terpisah terdiri dari aktivis, nelayan, dan jurnalis melakukan inspeksi atau pemeriksaan langsung dari Pulau Cangkir ke wilayah pesisir Tangerang. Hasilnya, sungguh mengejutkan.

Pagar laut masih berdiri kokoh di berbagai titik, mulai dari Desa Lontar dan Patramanggala (Kecamatan Kemiri), Desa Mauk Barat dan Ketapang (Kecamatan Mauk), hingga Desa Muncung (Kecamatan Muncung).

"Kami belum sempat lanjut ke Desa Kohod dan Tanjung Pasir, tapi laporan masyarakat menyebut pagar juga masih berdiri di sana," kata Khozinudin.

ELIT TERLIBAT

TA-MOR-PTR menyebut ada keterlibatan kelompok elit di balik proyek ini.

Mereka menyebut proyek pagar laut dibangun oleh Mandor Memet, dibiayai Eng Cun alias Gojali, dengan disupervisi Ali Hanafiah Lijaya —orang kepercayaan Aguan atau Sugianto Kusuma (73), salah seorang konglomerat properti Indonesia pemilik proyek PIK-2 di bawah bendera Agung Sedayu Group (ASG).

Catatan KMU, dinukil Selasa (14/4) kemarin dari liputan cnni Jumat (1/11/2024), bos ASG Aguan berkomitmen membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten, sebagai bagian dari pogram 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Aguan mengatakan, anggarannya sebesar Rp60 miliar diambil dari dana CSR (corporate social responsibility - kewajiban tanggung jawab sosial) PIK-2.

Kata Khozinudin, "Aneh (bin ajaib), di Bekasi pagar laut milik PT TRPN (PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara) bisa diakui dan diperintahkan dibongkar. Tapi di Tangerang, tidak ada satu pun perusahaan yang disebut (namanya)."

"Mengapa (ya)?" katanya mempertanyakan. Catatan lainnya dari kompas Jumat 17/1, menyebut kemunculan 3 pagar laut di seberang Pulau C, Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara, dengan panjang sekitar 1,5 kilometer dan 600 meter.

Catatan google menginformasikan ada juga aksi pemagaran pantai atau laut selain di Banten dan Tengerang, yakni di Batam, Sidoarjo, dan Surabaya.Di Sumatera Utara, sejauh ini belum ada laporan.

KRITIK KHIANAT TRENGGONO

Kritik tajam juga ditujukan kepada Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, yang dianggap membangun narasi palsu.

"Ini bukan hanya kebohongan biasa, tapi pengkhianatan terhadap kedaulatan negara," kata Khozinudin.

Ia juga menyayangkan keterlibatan TNI AL membongkar pagar laut, karena seharusnya itu menjadi kewajiban pelaku pemagaran, bukan militer --selaku institusi pertahanan negara.

TOLAK JADI ALAT LEGITIMASI

Nelayan Holid, salah satu tokoh lokal, mengaku sempat diminta menghadiri konferensi pers untuk menyatakan pagar laut telah dibongkar. Ia menolak, karena tidak ingin menjadi alat legitimasi kebohongan atau pembohongan publik.

PRABOWO HARUS MARAH

Sebagai mantan jenderal, Presiden Prabowo --yang berulang kali menyebut dirinya patriot-- menurut Khozinudin, juga harus marah, karena "Ini bukan sekadar urusan pagar, tapi soal harga diri negara." **(bes/cp/js)**

MA Bakal Pakai Sistem Robotik Tetapkan Majelis .....

Dari Halaman 1

saat ini sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk menyusun majelis hakim. Melalui aplikasi itu, kata dia, diharapkan dapat menekan celah-celah korupsi yang terjadi.

"Sebagaimana yang telah diterapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption," tuturnya.

Sebelumnya Kejagung menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait vonis lepas di perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit periode 2021-2022.

Ketujuh tersangka itu Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, pengacara Marcella Santoso dan Ariyanto, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan. Kemudian ketiga Majelis Hakim pemberi vonis lepas yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom .

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut terdapat bukti pemberian suap sebesar Rp60 miliar dari Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara korporasi PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group dan PT Musim Mas Group.

Ia mengatakan, uang itu diterima oleh Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat melalui Wahyu Gunawan yang saat itu menjabat sebagai Panitera Muda pada PN Jakarta Pusat.

"Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara agar Majelis Hakim yang mengadili perkara itu memberikan putusan onslagt," jelasnya.

Qohar mengatakan, Arif Nuryanta menggunakan jabatannya saat itu sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat dalam mengatur vonis lepas kepada tiga terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

"Jadi perkaranya tidak terbukti, walaupun secara unsur memenuhi pasal yang didakwakan, tetapi menurut pertimbangan majelis hakim bukan merupakan tindak pidana," tuturnya.**(cnni/js)**

KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti .....

Dari Halaman 1

2021-2022, Senin (14/4).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum bisa menyampaikan informasi perihal tempat yang digeledah. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan tersebut menyasar rumah kediaman mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (14/4).

"Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," imbuhnya.

Sementara itu, pantauan wartawan di lokasi, kediaman La Nyalla di Kawasan Wisna Permai Barat Mulyorejo Surabaya, dijaga sejumlah anggota ormas yang diduga Pemuda Pancasila. Puluhan orang uang mengenakan seragam loreng merah-oranye memenuhi teras depan rumah La Nyalla. Sejumlah mobil beratribut PP atau loreng merah-oranye juga terparkir di sekitarnya.

Sebelum ini, KPK sudah menyita tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar yang dikuasai oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Anwar Sadad.

KPK telah memeriksa Anwar Sadad dalam tahap penyidikan. Lembaga antirasuah ini setidaknya telah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri.

Mereka atas nama KUS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi JawaTimur); AS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).

Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Sampang).

MAH (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo), serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta.

Adapun sejak tanggal 15 hingga 18 Juli 2024 tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait perkara.

Terpisah, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti mengaku bingung rumah kediamannya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022, Senin (14/4).

La Nyalla mengaku tidak memiliki kaitan dengan mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi," ujar La Nyalla melalui siaran persnya, Senin (14/4).

Ia mengaku bukan penerima dana hibah atau Pokmas.

"Oleh karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang atau uang atau dokumen yang terkait dengan penyidikan," imbuhnya.

La Nyalla menyatakan hingga saat ini masih menunggu penjelasan dari KPK mengenai alasan rumahnya digeledah.

Ia berharap KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penggeledahan tersebut.

"Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis 'dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang atau barang atau dokumen yang diduga terkait perkara'. Jadi, sudah selesai," ungkap dia.

"Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apa pun dengan Kusnadi," pungkasnya. **(cnni/js)**

Satpam PT LJR 'Disandera' Pihak .....

Dari Halaman 1

santunan sebesar Rp15 juta, sementara biaya yang harus dibayar sebesar Rp l64 jutaan.

Biaya tersebut akan terus bertambah selama beliau masih belum pulang dari Rumah Sakit Delima.

Hal ini membuatnya dilema. Pihak rumah sakit tak mengijinkannya pulang sebelum menyelesaikan administrasi.

Untuk itu ia berharap, Gubernur Sumut Bobby Nasution dapat membantunya menyelesaikan permasalaha tersebut, sehingga ia bisa pulang ke rumah.

"Saya mohon kepada Bapak Gubernur Bobby Nasution bisa membantu saya, agar saya bisa pulang ke rumah," mohonnya, melalui video yang dilihat awak media, Sabtu (12/4/2025).

Kadisnaker Didesak Turun Tangan

Terpisah, Sekretaris Persatuan Buruh Sumatera Utara Rahmadsyah, mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumatera Utara untuk menindak perusahaan maupun penyalur tenaga kerja yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan, sehingga membuat Junaidi 'tersandera' di RS Delima.

"Kami minta Ketua Dewan K3 yang juga Kadisnaker Sumut hentikan operasional PT LJR, yang kami duga banyak pelanggaran ketenagakerjaan, sehingga pekerjanya ditahan di Rumah Sakit Delima," pungkasnya.

Terpisah, perusahaan penyalur yang dikonfirmasi awak media, hingga berita ini masuk ke meja redaksi, masih belum memberi tanggapan.**(A-10)**

Polda Sumut Ungkap .....

Dari Halaman 1

jang periode 24 Februari hingga 7 April 2025.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan, pengungkapan tersebut merupakan wujud keseriusan Polda Sumut dalam menjawab perhatian nasional terhadap ancaman narkoba.

"Kita ketahui bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ia menjadi akar dari berbagai tindak kejahatan yang merusak masyarakat. Untuk itu, Polda Sumut bersama jajaran akan terus bergerak tanpa kompromi," tegas Irjen Whisnu, Senin (14/4).

Irjen Whisnu juga menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang melibatkan TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, merinci bahwa selama periode tersebut berhasil diungkap 517 kasus dengan total 634 tersangka. Barang bukti yang disita antara lain sabu seberat 191,6 kg, ekstasi sebanyak 74.292 butir, ganja 11,9 kg, kokain 177 gram, dan pil happy five sebanyak 69.042 butir.

"Seluruh barang bukti ini jika beredar dapat merusak lebih dari 1 juta jiwa. Nilai ekonominya ditaksir mencapai lebih dari Rp237 miliar," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, barang bukti dilakukan pemusnahan dan proses hukum terhadap tersangka dilakukan secara tegas. Sebanyak 138 orang direhabilitasi dengan pendekatan restorative justice sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

"Ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti nyata bahwa kami tidak berhenti, dan akan terus bergerak untuk Sumut bebas narkoba," pungkas Calvijn.**(A-10)**

Efesien Anggaran Membersihkan PTN

Dari Halaman 1

gan kampus.

Dalam praktiknya, banyak PTN di Indonesia yang selama ini terjebak pada pola pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Dana besar digelontorkan untuk pembangunan fisik yang mewah, pelatihan-pelatihan seremonial, hingga perjalanan dinas yang kerap tak jelas hasilnya. Tidak sedikit pula proyek pengadaan yang sarat mark-up dan konflik kepentingan. Semua ini berjalan dengan legitimasi formal, namun minim akuntabilitas moral.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penggunaan anggaran di sektor pendidikan tinggi. Namun, sanksi atas pelanggaran tersebut sering kali tak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Maka, ketika anggaran dipangkas, ruang gerak untuk pemborosan turut menyempit—dan ini sejatinya adalah kabar baik.

Dari sudut pandang komunikasi organisasi, fenomena pemborosan ini merupakan gejala dari lemahnya komunikasi internal dan mekanisme umpan balik. Ketika suara civitas akademika—mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan—tidak terakomodasi dalam pengambilan keputusan strategis, maka pengelolaan anggaran mudah terjebak pada kepentingan segelintir elite birokrasi kampus. Efisiensi semestinya menjadi momen memperkuat dialog organisasi, membangun struktur komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan reflektif.

Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas. Ia justru bisa mendorong kampus untuk melakukan refleksi atas apa yang benar-benar esensial. Penguatan sistem pengajaran berbasis digital, peningkatan kompetensi dosen, serta penyediaan akses pendidikan bagi kelompok marjinal harus menjadi prioritas. Sebaliknya, program-program kosmetik yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata patut dipangkas.

Namun, efisiensi hanya akan berdampak positif bila diiringi dengan penguatan transparansi. PTN perlu membuka laporan keuangannya secara berkala kepada publik, melibatkan unsur mahasiswa dan dosen dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta memperkuat peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang sering kali hanya menjadi pelengkap administrasi.

Komunikasi publik kampus menjadi kunci dalam konteks ini. Ketika masyarakat menilai kampus tertutup, maka krisis kepercayaan akan sulit dihindari. Sudah waktunya PTN mengadopsi pendekatan komunikasi strategis—terbuka, berbasis data, dan responsif terhadap kritik—untuk mengelola ekspektasi publik dan membangun legitimasi sosial yang kokoh.

Lebih jauh, efisiensi juga membuka ruang untuk inovasi. Banyak universitas dunia yang menjadi rujukan justru mampu bertransformasi karena keterbatasan dana mendorong kreativitas. Kolaborasi lintas fakultas, pengembangan modul daring, hingga kemitraan dengan dunia industri dapat menjadi solusi berbiaya rendah dengan dampak tinggi.

Tantangannya, tentu, ada pada perubahan budaya birokrasi kampus yang selama ini terlalu nyaman dalam zona "anggaran pasti turun setiap tahun". Kini, ketika alokasi berkurang, kampus harus mulai menghitung kembali kebutuhan riil dan belajar mengelola dengan pendekatan berbasis kinerja.

Efisiensi juga memberi peluang untuk merombak struktur kelembagaan yang gemuk dan tidak produktif. Banyak unit, pusat studi, atau program kerja yang eksis lebih karena kepentingan politis internal, bukan karena kebutuhan akademik. Dengan efisiensi, keberlanjutan tiap unit harus diuji berdasarkan dampaknya, bukan sekadar sejarah keberadaannya.

Dalam jangka panjang, efisiensi dapat mendorong terwujudnya kampus yang lebih demokratis. Ketika keputusan anggaran menyangkut banyak pihak dan harus melibatkan komunitas kampus secara luas, ruang dialog dan partisipasi akan tumbuh. Ini bisa menjadi awal dari tata kelola perguruan tinggi yang lebih sehat dan berkeadilan.

Lebih dari sekadar penghematan, efisiensi adalah koreksi arah. Ia mengingatkan kita bahwa keberhasilan sebuah institusi pendidikan tidak diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari seberapa bijak dan adil anggaran itu digunakan untuk menciptakan pengetahuan dan peradaban.

Dan akhirnya, kita harus ingat bahwa setiap rupiah di PTN bukanlah milik institusi, melainkan milik rakyat. Maka, setiap langkah efisiensi adalah bentuk penghormatan terhadap kepercayaan publik, dan setiap rupiah yang diselamatkan adalah investasi etis bagi masa depan bangsa.